

## ANALISIS KORELASI ANTARA PAJAK EKSPOR DAN NILAI EKSPOR DI INDONESIA (PERIODE 1987-2007)

Oleh:  
Sukarsih<sup>1)</sup>, Diah Setyorini Gunawan<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

### ABSTRACT

*This research aim to know the existence of correlation between export tax (as a transaction cost in export transaction) and export value in Indonesia. This research used secondary data (export tax earning and export value) with time period between 1987-2007. Analysis tool in this research involve descriptive analysis and paired samples correlations. Based on the analysis result, there's no correlation between export tax and export value. Even there's no correlation between export tax and export value, government as policy maker must consider about export tax. Export tax may not pursue export transaction.*

**Keywords:** *transaction cost, export tax, export value*

### PENDAHULUAN

Ciri yang membedakan *New Institutional Economics* (NIE) dengan Neoklasik adalah adanya ide bahwa transaksi-transaksi menimbulkan biaya. Dengan kata lain, biaya transaksi bukanlah nol. Ide ini lebih realistis dibandingkan ide bahwa biaya transaksi adalah nol.

Selama individu-individu dianggap memiliki rasionalitas terbatas maka akan muncul biaya transaksi dan *nonzero transaction costs* akan terjadi pada sektor dan tipe aktivitas apapun. Individu-individu memiliki pengetahuan yang terbatas dan kecenderungan untuk melakukan kesalahan. Kenyataan ini berseberangan dengan teori Neoklasik.

Biaya transaksi adalah substansial. Berdasarkan beberapa estimasi, biaya transaksi di pasar ekonomi modern sekitar 50-60% dari produk nasional netto. Biaya ini tidak mencakup biaya untuk mendirikan lembaga atau organisasi baru. "Penemuan" biaya transaksi oleh Ronald Coase (1937) dan penggunaannya sebagai suatu *heuristic device* mengawali suatu revolusi dalam pemikiran ekonomi mikro. Ide dari Coase ini menjadi pendorong utama berkembangnya NIE (Furubotn dan Richter, 1988: 39).

Menurut Oliver E. Williamson, teori ekonomi biaya transaksi merupakan suatu upaya untuk dapat memahami organisasi dalam perekonomian yang kompleks dengan menggabungkan secara selektif teori hukum, teori ekonomi, dan teori organisasi. Teori ekonomi biaya transaksi tepat diterapkan pada pasar pertukaran yang kompleks sedangkan teori ekonomi Neoklasik hanya dapat diterapkan pada pasar pertukaran yang sederhana (Menard dan Shirley, 2005: 41).

Teori ekonomi biaya transaksi sering digunakan untuk mengukur efisien tidaknya desain

kelembagaan. Semakin tinggi biaya transaksi berarti semakin tidak efisien desain kelembagaan tersebut, dan sebaliknya.

Ekspor mempunyai peranan penting dalam pembentukan Produk Nasional Bruto (PNB) suatu negara. Peningkatan peran ekspor akan meningkatkan cadangan moneter internasional, stabilitas nilai mata uang, dan pertumbuhan ekonomi (Todaro dan Smith, 2003: 517).

Salah satu hal yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan peran ekspor yaitu masalah biaya tinggi. Masalah biaya tinggi ini akan berpengaruh pada daya saing. Biaya yang lebih tinggi menjadikan ekspor suatu negara lebih mahal dibandingkan para pesaingnya. Pajak ekspor merupakan salah satu biaya yang harus dikeluarkan para eksportir ketika melakukan transaksi ekspor. Dengan kata lain, pajak ekspor termasuk kategori biaya transaksi dalam transaksi ekspor.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah apakah terdapat korelasi antara pajak ekspor dan nilai ekspor di Indonesia.

### LANDASAN TEORI

#### 1. Biaya Transaksi

Neoklasik menganggap pasar berjalan secara sempurna tanpa biaya apapun karena pembeli memiliki informasi yang sempurna dan penjual saling berkompetisi sehingga menghasilkan harga yang rendah. Tetapi dunia nyata faktanya adalah sebaliknya, di mana informasi, kompetisi, sistem kontrak, dan proses jual beli bisa sangat asimetris. Inilah yang menimbulkan adanya biaya transaksi, yang sekaligus bisa didefinisikan sebagai biaya-biaya

untuk melakukan proses negosiasi, pengukuran, dan pemaksaan pertukaran. Singkatnya menurut Greif (1998), teori biaya transaksi menggunakan transaksi sebagai basis unit analisis sedangkan teori Neoklasik memakai produk sebagai dasar unit analisis.

a. Biaya Transaksi Pasar

Secara spesifik, biaya transaksi pasar dikategorikan menjadi:

- Biaya pencarian dan informasi
  - Biaya yang muncul karena individu atau perusahaan membuat pengeluaran secara langsung, misal biaya iklan.
  - Biaya yang muncul secara tidak langsung melalui kreasi pasar yang terkoordinasi, misal biaya pameran.
  - Biaya komunikasi di antara pihak-pihak yang dianggap prospektif untuk melakukan pertukaran, misal biaya pada perwakilan penjualan.
- Biaya negosiasi dan pengambilan keputusan
  - Pengeluaran ketika terjadi negosiasi dan pengambilan keputusan.
  - Biaya pengambilan keputusan meliputi biaya pengumpulan informasi, kompensasi yang dibayar kepada penasehat dan biaya untuk menyepakati keputusan di dalam kelompok.
- Biaya pengawasan dan pemaksaan
  - Biaya pengawasan dan pemaksaan kewajiban yang tertuang dalam kontrak.
  - Biaya ini muncul karena kebutuhan untuk mengawasi waktu pengiriman yang disetujui, mengukur kualitas dan jumlah produk, dan sebagainya.

b. Biaya Transaksi Manajerial

Secara spesifik, biaya transaksi manajerial dikategorikan menjadi:

- Biaya penyusunan (*setting up*), pemeliharaan dan perubahan dalam desain organisasi. Biaya ini juga mencakup biaya yang secara tipikal termasuk dalam kategori biaya transaksi tetap.
- Biaya menjalankan organisasi:
- Biaya informasi.
  - Biaya informasi mencakup biaya untuk membuat keputusan, pengukuran kinerja karyawan, biaya manajemen informasi, dan sebagainya.
  - Biaya yang diasosiasikan dengan transfer fisik barang dan jasa yang divisinya terpisah.  
Contoh: biaya transportasi perusahaan.

c. Biaya Transaksi Politik

Biaya transaksi politik berhubungan dengan penyediaan organisasi dan barang publik yang diasosiasikan dengan aspek politik. Secara umum, biaya ini tidak lain adalah biaya penawaran barang publik yang dilakukan melalui tindakan kolektif. Biaya ini meliputi:

- Biaya penyusunan, pemeliharaan dan perubahan organisasi politik formal serta informal; biaya ini meliputi biaya pertahanan, administrasi pengadilan dan pendidikan.
- Biaya untuk menjalankan politik; biaya ini merupakan pengeluaran masa sekarang untuk hal-hal yang berkaitan dengan tugas kekuasaan.

## 2. Aplikasi New Institutional Economics pada Pasar, Perusahaan, dan Negara

Sentral dari NIE adalah pada solusi permasalahan koordinasi dalam transaksi ekonomi antar individu yang disebut dengan kesepakatan bersama. Kontrak relasional antar individu dapat berbentuk bilateral atau multilateral. Keduanya merupakan tindakan bersama di antara dua atau lebih individu. Contoh kontrak relasional yang berbentuk bilateral yaitu kooperasi di antara pembeli dan penjual pada suatu pasar pertukaran, sedangkan contoh kontrak relasional yang berbentuk multilateral yaitu kooperasi di antara semua pembeli dan penjual yang membentuk suatu pasar (Furubotn dan Richter, 2001: 265).

Secara umum, organisasi dipahami sebagai kelompok individu-individu yang terstruktur yang berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Organisasi meliputi perusahaan, pasar, dan negara. Tiap anggota organisasi memiliki tujuan masing-masing yang bisa jadi sejalan dengan tujuan bersama dan bisa jadi tidak sejalan dengan tujuan bersama. Permasalahan ini diselesaikan melalui suatu konstitusi formal maupun konstitusi informal. Dari sudut pandang *New Economics of Organizations* (Moe 1984; Williamson 1993), suatu organisasi merupakan suatu network dari relational contracts antar individu-individu yang memiliki tujuan untuk mengatur transaksi-transaksi ekonomi antar anggota organisasi (Furubotn dan Richter, 2001: 270).

Konsep kontrak relasional terkait dengan transaksi pasar, transaksi manajerial, dan transaksi politik. Sebagai tambahan, terdapat transaksi sosial yang memainkan peranan pada semua hubungan sosial (Homans 1958; Blau 1964). Modal sosial mencakup kewajiban-kewajiban, harapan-harapan, dan secara bersama-sama mengembangkan norma-norma dan sanksi-sanksi dalam interaksi-interaksi sosial (Starr and MacMillan, 1990).

## 3. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah transaksi dagang di antara para subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara lain, baik mengenai barang atau pun jasa-jasa. Transaksi dagang ini harus memperhatikan syarat-syarat dalam diplomasi komersial tersebut. Diplomasi memberikan dasar atas pelaksanaan perdagangan internasional (Sobri, 1997: 2).

Perdagangan internasional mencakup pertukaran barang, jasa, dan faktor produksi antar negara. Transaksi ini menimbulkan dampak pada perekonomian domestik maupun global. Ciri-ciri unik perdagangan internasional antara lain, yaitu (Markusen et al, 1995: 5-6):

1. Asumsi bahwa tenaga kerja dapat berpindah secara sempurna dalam wilayah suatu negara tetapi tidak dapat berpindah secara sempurna antar negara. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan pemerintah dan perbedaan-perbedaan dalam hal bahasa, agama, dan kebiasaan sosial. Asumsi ini juga berlaku bagi faktor produksi yang lain.
2. Terdapat kekuatan peraturan pemerintah pada perdagangan internasional. Kekuatan peraturan pemerintah tidak terdapat pada perdagangan antar daerah dalam suatu negara.

Teori Heckser-Ohlin menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang menggunakan lebih banyak faktor produksi yang relatif melimpah di negara tersebut. Karakteristik utama yang membedakan tiap negara adalah kondisi relatif penawaran modal dan tenaga kerja (Markusen et al, 1995: 106).

Kebijaksanaan ekonomi internasional timbul karena makin meluasnya jaringan-jaringan hubungan ekonomi dan perdagangan internasional. Masalah kebijaksanaan ekonomi internasional itu adalah segala tindakan pemerintah langsung atau pun tidak langsung untuk mempengaruhi komposisi, arah, dan bentuk perdagangan serta neraca pembayaran internasional. Kebijakan tersebut mencakup masalah tarif, kuota, dan berbagai restriksi lainnya serta mencakup kebijaksanaan ekonomi dalam negeri yang berpengaruh pada kegiatan perdagangan internasional. Tarif dapat digolongkan menjadi (Sobri, 1997: 69-72):

1. Pajak ekspor  
Pajak ekspor adalah pajak yang dikenakan atas barang tertentu yang diangkut ke negara lain atau keluar dari batas daerah pabean.
2. Bea transit  
Bea transit adalah bea yang dikenakan atas barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang-barang tersebut tujuan terakhirnya adalah negara lain.
3. Bea masuk  
Bea masuk adalah bea yang dikenakan atas barang-barang yang masuk ke dalam daerah pabean suatu negara, dan negara tersebut adalah tujuan akhirnya.

## METODE PENELITIAN

### 1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dan secara kerangka waktu (*time-frame*) penelitian ini menggunakan pendekatan runtun waktu (*time series*), dimana pengambilan data penelitian dilakukan pada beberapa titik waktu (1987-2007). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi data penerimaan pajak ekspor dan nilai ekspor di Indonesia. Data penerimaan pajak ekspor digunakan sebagai pengukur proksi pajak ekspor.

### 2. Metode Analisis

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi beberapa tahap, yaitu:

#### a. Analisis Deskriptif

Pada tahap analisis ini dilakukan deskripsi data untuk masing-masing variabel yang akan diteliti.

#### b. Analisis Bivariat

Penelitian ini menggunakan analisis bivariat. Pada analisis ini dilakukan analisis hubungan antara dua variabel, yaitu variabel pengukur proksi pajak ekspor dengan variabel nilai ekspor. Analisis statistik yang digunakan adalah uji *paired samples correlations*.

#### c. Penyimpulan Hasil Penelitian

Untuk menyimpulkan hasil penelitian akan dilihat dari hasil analisis data. Pada analisis bivariat, hubungan yang berupa dampak antara variabel pajak ekspor dengan variabel nilai ekspor bermakna bila nilai  $p < 0,05$ .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Analisis Deskriptif

Dalam analisis deskriptif dilakukan deskripsi data untuk masing-masing variabel yang diteliti. Hasil analisis deskriptif seluruh variabel yang digunakan pada penelitian disajikan pada tabel 1.

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui *range*, nilai minimum, nilai maksimum dan *mean* (nilai rata-rata) untuk masing-masing variabel.

#### a. Variabel Pajak Ekspor

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa selama periode 1987-2007, besarnya variabel pengukur proksi pajak ekspor adalah tidak sama. Hal ini ditunjukkan dengan adanya nilai minimum dan nilai maksimum penerimaan pajak ekspor.

**Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif**

Variabel	N	Range	Minimum	Maksimum	Mean
Pajak Ekspor	21	4.621.200	8.800	4.630.200	494.490
Nilai Ekspor	21	96.965	17.136	114.101	51.711

Nilai minimum penerimaan pajak ekspor pada periode 1987-2007 adalah sebesar 8.800 juta rupiah (nilai penerimaan pajak ekspor pada tahun 1992), sedangkan nilai maksimum penerimaan pajak ekspor adalah sebesar 4.630.200 juta rupiah (nilai penerimaan pajak ekspor pada tahun 1998). *Range* (selisih nilai maksimum dengan nilai minimum) penerimaan pajak ekspor pada periode tersebut adalah sebesar 4.621.200 juta rupiah sedangkan rata-rata penerimaan pajak ekspor pada periode 1987-2007 adalah sebesar 494.490 juta rupiah.

b. Variabel Nilai Ekspor

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa selama periode 1987-2007, besarnya variabel nilai ekspor di Indonesia adalah tidak sama. Hal ini ditunjukkan dengan adanya nilai minimum dan nilai maksimum nilai ekspor. Nilai minimum nilai ekspor pada periode 1987-2007 adalah sebesar 17.136 US\$ (nilai ekspor pada tahun 1987), sedangkan nilai maksimum nilai ekspor adalah sebesar 114.101 US\$ (nilai ekspor pada tahun 2007). *Range* nilai ekspor pada periode tersebut adalah sebesar 96.965 US\$ sedangkan rata-rata nilai ekspor pada periode 1987-2007 adalah sebesar 51.711 US\$.

**2. Hasil Analisis Bivariat**

Dalam analisis bivariat dilakukan analisis hubungan antara dua variabel, yaitu variabel pengukur proksi pajak ekspor dengan variabel nilai ekspor selama periode pengamatan (1987-2007). Analisis statistik yang digunakan adalah uji *paired samples correlations*. Hasil uji *paired samples correlations* disajikan pada tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Uji Paired Samples Correlations**

	N	Correlatio n	Sig.
Pair 1 Pajak Ekspor & Nilai Ekspor	21	0,152	0,511

Berdasarkan uji *paired samples correlations* dapat diketahui tidak terdapat korelasi antara pajak ekspor dan nilai ekspor. Dengan kata lain, perubahan pajak ekspor tidak memiliki dampak terhadap nilai ekspor di Indonesia selama periode 1987-2007. Hal ini dapat diketahui dari nilai signifikansi variabel tersebut yang > 0,05.

Pada periode 1987-2007, ternyata pajak ekspor selaku biaya transaksi dalam transaksi ekspor tidak memiliki dampak terhadap nilai ekspor di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pajak ekspor bukanlah faktor yang menghambat transaksi ekspor. Dimungkinkan terdapat faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh pada nilai ekspor. Faktor-faktor tersebut antara lain, yaitu fluktuasi nilai tukar rupiah, permintaan dari luar negeri, proteksi perdagangan yang dilakukan negara lain, dan kualitas produk ekspor yang dihasilkan.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis korelasi pajak ekspor dan nilai ekspor di Indonesia periode 1987-2007 dapat diketahui bahwa pajak ekspor tidak memiliki korelasi dengan nilai ekspor. Dengan kata lain, perubahan pajak ekspor tidak memiliki dampak terhadap nilai ekspor. Kondisi ini dapat diartikan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh pada nilai ekspor dibandingkan faktor pajak ekspor.

Meskipun pajak ekspor tidak memiliki korelasi dengan nilai ekspor, Pemerintah selaku pembuat kebijakan harus tetap memperhatikan variabel tersebut. Tingkat pajak ekspor yang ditetapkan Pemerintah tidak boleh menghambat transaksi ekspor. Penetapan tingkat pajak ekspor harus mempertimbangkan kepentingan para eksportir guna mendukung upaya peningkatan daya saing ekspor di pasar internasional.

**DAFTAR PUSTAKA**

Boediono. 1997. *Ekonomi Internasional*. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE.

Burgenmeier, B. 1998. Policy Mix for Environmental Protection A Transaction Costs Approach. *Working Paper W81. International Academy of the Environment. Geneva.*

Dagnino, J.M. dan P.E. Farina. 1999. *Transaction Costs in Argentina*. University of Buenos Aires. July.

Furubotn, G. and R. Richter. 2001. *Institutions and Economic Theory: The Contribution of The New Institutional Economics*. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Hardt, L. 2006. Transaction Cost Economics as a Three Dimensional Externally Driven Research Program. *Economic Studies. Number 1-2: 7-31.*

Hardt, L. 2009. The History of Transaction Cost Economics and Its Recent Developments. *Erasmus Journal for Philosophy and Economics. Volume 2. Issue 1: 29-51.*

Klein, P.G. 1999. *New Institutional Economics. Journal of Economic Literature, 0530.*

Macher, J.T. and B.D. Richman. 2008. Transaction Cost Economics: An Assessment of Empirical Research in the Social Science, Business, and Politics. *Volume 10. Issue 1. Article 1.*

- Markusen, J.R. et al. 1995. *International Trade: Theory and Evidence*. USA: McGraw-Hill, Inc.
- Menard, C. and M.M. Shirley. 2005. *Handbook of New Institutional Economics*. Netherlands: Springer.
- Pessali, H.F. 2006. The Rhetoric of Oliver Williamson's Transaction Cost Economics. *Journal of Institutional Economics*. 2:1, 45-65.
- Polski, Margaret M. 2000. *Measuring Transaction Costs and the Institutional Change in the US Commercial Banking Industry*. Institute for Development Strategies Indiana University. August 1.
- Sobri. 1997. *Ekonomi Internasional: Teori, Masalah, dan Kebijaksanaannya*. Yogyakarta: BPFU-UII.
- Todaro, M.P. and S.C. Smith. 2003. *Economic Development. 8<sup>th</sup> Edition*. United Kingdom: Pearson Education Limited.
- Wang, N. 2003. Measuring Transaction Costs: An Incomplete Survey. Ronald Coase Institute Working Paper Series. Number 2. February.
- Yustika, A.E. 2008. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Yustika, A.E. 2008. The Transaction Cost of Sugarcane Farmers: An Explorative Study. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Volume 23. Nomor 3. Juli.

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses 10 Desember 2009.

[www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id) diakses 10 Desember 2009

